

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan Program Kelurahan Tangguh Bencana (Katana) sebagai upaya peningkatan kapasitas mitigasi bencana di Kota Semarang bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan secara optimal. Program ini membutuhkan koordinasi, kolaborasi, serta keterlibatan aktif dari berbagai pihak, baik pemerintah daerah, perangkat kelurahan, relawan kebencanaan, maupun masyarakat sebagai aktor utama dalam menghadapi potensi bencana di lingkungan mereka.

Pemerintah Kota Semarang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berperan sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab dalam mengimplementasikan program tersebut. Namun dalam pelaksanaannya, keberhasilan Program Katana tidak hanya bergantung pada pemerintah saja, melainkan juga dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, kapasitas relawan, serta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan lainnya di tingkat lokal.

Penelitian ini menghasilkan tiga simpulan utama mengenai pelaksanaan Program Kelurahan Tangguh Bencana (KATANA) di Kota Semarang. Pertama, tingkat pelaksanaan program menunjukkan perbedaan yang nyata antar kelurahan. Kelurahan Gajahmungkur mencapai tingkat ketangguhan Utama dengan forum yang aktif, koordinasi rutin dengan BPBD, partisipasi masyarakat yang tinggi, serta sarana dan prasarana yang memadai. Kelurahan Meteseh menunjukkan partisipasi

masyarakat pada tingkat sedang dengan kekuatan pada gotong royong saat kejadian bencana, tetapi masih menghadapi kendala luas wilayah dan keterbatasan sumber daya. Kelurahan Rowosari berada pada tingkat Pratama dengan partisipasi masyarakat rendah, legalitas forum yang belum final, serta kegiatan yang bersifat reaktif.

Evaluasi Program Katana berdasarkan enam kriteria William N. Dunn menunjukkan hasil yang konsisten. Efektivitas program tercapai pada peningkatan pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat di kelurahan dengan tingkat ketangguhan tinggi, tetapi rendah di kelurahan dengan tingkat ketangguhan rendah. Efisiensi pelaksanaan program rendah karena pemanfaatan anggaran dan sumber daya belum optimal. Kecukupan program belum terpenuhi akibat cakupan pelatihan dan sarana prasarana yang tidak merata di seluruh kelurahan. Kesamaan manfaat antar kelurahan juga belum tercapai. Responsivitas program berjalan pada tingkat respons darurat, tetapi lemah pada tahap pencegahan dan mitigasi jangka panjang. Ketepatan program rendah karena strategi yang diterapkan belum sepenuhnya sesuai dengan karakteristik risiko bencana spesifik di masing-masing kelurahan.

Program Katana menghasilkan dampak nyata pada empat unit yang diteliti. Pada tingkat individu, program meningkatkan pengetahuan warga tentang risiko bencana dan mengurangi tingkat kepanikan saat menghadapi kejadian. Pada tingkat organisasi, forum Katana memperkuat peran BPBD sebagai fasilitator di tingkat kelurahan. Pada tingkat lembaga dan sistem sosial, program memperkuat kerja sama antar organisasi kemasyarakatan seperti RT/RW, PKK, karang taruna, dan relawan. Pada tingkat masyarakat secara luas, program meningkatkan solidaritas

sosial dan kapasitas pemulihan pasca bencana. Dampak tersebut sudah terbentuk, tetapi belum merata di ketiga kelurahan yang menjadi objek penelitian.

Program Katana telah membangun fondasi ketangguhan masyarakat di tingkat kelurahan. Program ini berhasil menciptakan mekanisme koordinasi dan meningkatkan kesadaran terhadap risiko bencana. Namun, implementasi program masih menunjukkan ketidakmerataan yang signifikan antar kelurahan. Faktor penentu utama keberhasilan program meliputi status ketangguhan, legalitas kelembagaan, ketersediaan anggaran, koordinasi antar pemangku kepentingan, serta tingkat partisipasi masyarakat. Tanpa perbaikan yang terarah dan sistematis pada faktor-faktor tersebut, Program KATANA sulit mencapai tujuan penuh dalam membangun ketangguhan bencana yang merata dan berkelanjutan di Kota Semarang.

Pendekatan evaluasi kebijakan William N. Dunn dan evaluasi dampak memberikan gambaran yang komprehensif tentang kondisi Program KATANA saat ini. Hasil penelitian ini menjadi bukti empiris bahwa kebijakan penanggulangan bencana berbasis kelurahan memerlukan penyesuaian yang lebih kontekstual dan berkelanjutan agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Kota Semarang.

4.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sesuai dengan temuan di lapangan sebagai berikut:

1. BPBD Kota Semarang menetapkan standar minimum legalitas dan keaktifan Forum KATANA di setiap kelurahan. Standar ini harus mencakup penerbitan Surat Keputusan resmi dari Walikota atau Kepala BPBD, pembentukan struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas yang tegas, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi rutin setiap enam bulan. Dengan adanya standar ini, forum di setiap kelurahan memiliki kedudukan hukum yang kuat sehingga dapat mengakses anggaran, bekerja sama dengan pihak eksternal, dan melaksanakan kegiatan secara berkelanjutan. Tanpa standar yang jelas, forum akan terus mengalami ketidakpastian seperti yang terjadi di Kelurahan Rowosari.
2. Pemerintah Kota Semarang mengalokasikan anggaran khusus yang memadai dan proporsional untuk Program KATANA. Alokasi anggaran harus didasarkan pada tingkat risiko bencana masing-masing kelurahan, bukan hanya jumlah penduduk. Anggaran tersebut digunakan untuk pembelian sarana prasarana mitigasi, pelaksanaan pelatihan rutin, serta kegiatan simulasi dan monitoring. Pengalokasian yang proporsional akan mengurangi kesenjangan antar kelurahan dan memastikan setiap forum memiliki peralatan yang cukup untuk menjalankan tugasnya. Hal ini sangat penting mengingat keterbatasan anggaran menjadi kendala utama di Kelurahan Meteseh dan Rowosari.
3. BPBD Kota Semarang merancang program pelatihan dan simulasi yang berkelanjutan serta disesuaikan dengan ancaman bencana spesifik di setiap kelurahan. Pelatihan tidak boleh bersifat sporadis, melainkan dilakukan minimal dua kali dalam setahun dengan materi yang mencakup penyusunan peta risiko, prosedur evakuasi mandiri, manajemen dapur umum, serta pemulihan pasca

bencana. Materi pelatihan harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah, misalnya fokus pada longsor di Kelurahan Gajahmungkur dan banjir kiriman di Kelurahan Rowosari. Pendekatan ini akan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat secara nyata dan menjadikan pelatihan bukan sekadar formalitas.

4. Lurah dan pengurus Forum KATANA meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pendekatan berbasis komunitas RT/RW. Setiap kelurahan wajib melibatkan seluruh lapisan warga, termasuk kelompok rentan seperti lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas, dalam kegiatan sosialisasi, pelatihan, penyusunan rencana kontinjensi, serta simulasi evakuasi. Partisipasi dapat ditingkatkan dengan cara membentuk tim kecil di setiap RW dan memberikan penghargaan kepada warga yang aktif. Langkah ini akan mengubah pola partisipasi yang selama ini masih reaktif menjadi partisipasi yang aktif dan preventif.
5. BPBD Kota Semarang melaksanakan evaluasi menyeluruh terhadap Program Katana setiap tahun dengan menggunakan kerangka evaluasi kebijakan William N. Dunn. Evaluasi tahunan harus mencakup pengukuran enam kriteria (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas, dan ketepatan) serta analisis dampak pada individu, organisasi, lembaga, dan masyarakat. Hasil evaluasi harus disusun dalam laporan resmi dan dijadikan dasar penyusunan rekomendasi perbaikan serta penyesuaian strategi program di tahun berikutnya. Evaluasi rutin ini akan memastikan program terus diperbaiki dan tidak berhenti pada tingkat formalitas semata.

Pelaksanaan lima saran di atas secara konsisten dan terkoordinasi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas Program KATANA secara signifikan. Harapannya program ini tidak hanya menjadi kegiatan rutin, melainkan instrumen yang benar-benar mampu membangun ketangguhan masyarakat yang merata dan berkelanjutan di seluruh kelurahan di Kota Semarang.